



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI DENGAN MENTERI LUAR NEGERI,
MENTERI PERTAHANAN, DAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : V
Rapat ke- : 14 (empat belas)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu 19 Juni 2024
Waktu : 10.00 s.d. 11.34 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : H. Teuku Riefky Harsya, M.T. (Wakil Ketua Komisi I DPR RI/F-P. Demokrat)
- Acara : Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan:
1. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Republic of India concerning Cooperation in the Field of Defence*).
 2. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République D'Indonésie et le Gouvernement de la République Francaise relatif a la Coopération dans le Domaine de la Défense*).
 3. RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence*).
 4. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia Concerning Cooperation in the Field of Defence*).

5. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*).

Sekretaris Rapat : Sartomo, S.S., M.Si. (Kepala Bagian Sekretariat Komisi I DPR RI)

Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI**

12 orang hadir dari 50 orang Anggota dengan rincian:

1. PIMPINAN

1. Meutya Viada Hafid (F.P-Golkar)
2. H. Teuku Riefky Harsya, M.T. (F.P-Demokrat)

2. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

6 orang hadir dari 11 orang Anggota

1. Ir. Rudianto Tjen
2. Junico BP. Siahaan, S.E.
3. Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si.
4. Dr. H. Hasanuddin, M.M., M.Si.
5. Mayjen TNI Mar. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.
6. H. Mohammad Idham Samawi

3. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

1 orang hadir dari 7 orang Anggota

4. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

0 orang hadir dari 7 orang Anggota

5. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

1 orang hadir dari 4 orang Anggota

1. Hasbi Anshory, S.E., M.M.

6. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 orang hadir dari 5 orang Anggota

1. Drs. H. Taufiq R. Abdullah
2. H. Andi Najmi Fuaidi, S.H.

7. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

1 orang hadir dari 5 orang Anggota

8. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

1 orang hadir dari 5 orang Anggota

1. Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.

9. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

0 orang hadir dari 4 orang Anggota

10. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang hadir dari 2 orang Anggota

B. UNDANGAN :

1. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Lestari Priansari Marsudi, S.H., LL.M.
2. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Pahala Nugraha Mansuri.
3. Wakil Menteri Pertahanan RI, Letjen TNI Purnawirawan M. Herindra.
4. Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemkumham, Dr. Asep Nana Mulyana.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T./F-P. DEMOKRAT):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu Menlu, Ibu Retno Marsudi beserta jajaran, kemudian juga Bapak Wamenhan, Letjen TNI Purnawirawan M. Herindra yang mewakili Menhan, dan seluruh jajaran. Kemudian Pak Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemkumham, Dr. Asep Nana Mulyana, oke sedang perjalanan, direktur yang sudah hadir beserta seluruh jajaran. Kemudian Bapak-Ibu Anggota Komisi I DPR RI dalam Raker Komisi I DPR RI pada hari ini, Rabu, 19 Juni 2024.

Berdasarkan catatan dari Sekretariat, saat ini daftar hadir sudah memenuhi kuorum fraksi, ya, nanti di mana masing-masing fraksi juga akan menyampaikan pandangannya terhadap RUU ini, dan sesuai dengan tata tertib, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Kerja Komisi I dengan Pemerintah dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Hukum dan HAM, dengan ini kami buka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)

Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah pada hari ini dilaksanakan dalam rangka pembahasan pembicaraan tingkat I terhadap:

1. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Republic of India concerning Cooperation in the Field of Defence*).
2. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République D'Indonésie et le Gouvernement de la République Francaise relatif a la Coopération dans le Domaine de la Défense*).
3. RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence*).
4. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia Concerning Cooperation in the Field of Defence*).
5. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*).

Adapun untuk kelima RUU tersebut, rangkaian agenda sebagai berikut: yang pertama adalah penjelasan pemerintah, yang kedua dilanjutkan dengan pandangan 9 fraksi, yang ketiga pembahasan DIM RUU dan DIM penjelasan, dalam hal ini adalah untuk pembentukan panjangnya.

Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada agenda berikutnya, dapat kami sampaikan kronologis pembahasan kelima RUU pengesahan RUU tersebut di atas sebagai berikut.

Pertama, Presiden melalui surat Nomor R.45/Pres/09/2022, tanggal 20 September, serta surat Nomor R.48/Pres/09/2023, dan R.49/Pres/09/ 2023, R.50/Pres/09/2023, dan R.51/Pres/09/2023, tanggal 27 September, telah menyampaikan 5 RUU tersebut kepada DPR RI dan menugaskan Menlu, Menhan, dan Menkumham untuk bersama-sama dengan DPR RI membahas kelima RUU tersebut di atas.

Selanjutnya, Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus tanggal 9 September dan 8 November 2023, telah menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas kelima RUU pengesahan persetujuan tentang kerja sama terkait pertahanan tersebut di atas bersama-sama dengan pemerintah.

Selanjutnya menindaklanjuti penugasan Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus dan Rapat Intern Komisi I DPR RI yang telah mengagendakan untuk kelima RUU tersebut. Untuk itu, Komisi I DPR RI telah melaksanakan.

Satu, Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar, akademisi pada tanggal 6 Februari 2023. Hadir saat itu Drs. Makmur Keliat, kemudian Drs. Teuku Rezasyah M.A., Ph.D. dari Unpad. Tadi, Pak Makmur Keliat dari Ph.D. dari UI, kemudian Mayjen TNI Dr. Jonni Mahroza, Warek I UNHAN, kemudian Profesor Hikmahanto Juwana, Rektor Unjani.

Kemudian, RDPU dengan pakar akademisi pada tanggal 26 Maret, ketika itu hadir Prof. Angel Damayanti, Ph.D. Guru Besar Ilmu Keamanan Internasional UK, kemudian hadir juga pada saat itu Muhammad Arifin, Ph.D. Kajian Keamanan dan Konflik Pusat Penelitian Politik dari BRIN, kemudian juga Curie Maharani Savitri, Ph.D. Dosen Hubungan Internasional Universitas Binus.

Lanjut, dengan RDP dengan pejabat Eselon I Kemhan, Kemlu, dan Kemkumham pada 22 Mei 2024, dengan Dirjen Strahan Kemhan, dengan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu, dengan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemkumham dalam rangka mendapatkan masukan terhadap kelima RUU Pengesahan Persetujuan tentang Kerja Sama terkait Pertahanan tersebut di atas.

Pada hari ini Komisi I DPR RI kembali melaksanakan Raker dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan pembicaraan tingkat I terhadap 5 RUU tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada agenda penjelasan dari Pemerintah terhadap 5 RUU kerja sama bidang pertahanan.

Untuk itu, kepada yang terhormat Ibu Menlu, kami persilakan.

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA (RETNO LESTARI PRIANSARI MARSUDI, S.H., LL.M.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam Kebajikan,
Rahayu dan selamat pagi.

Yang saya hormati Ketua Pimpinan, Anggota Komisi I,

Terima kasih, pertama-tama atas undangan untuk mengadakan rapat kerja hari ini. Dan hari ini hadir bersama kami Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal Purnawirawan Muhammad Herindra, Pak Sekjen Kemhan Marsdya Purnawirawan Donny Ermawan, Pak Direktur Jenderal Peraturan

Perundang-Undangan Kemenkumham Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, *oh* belum, menyusul, menyusul, dan tentunya kami sendiri didampingi oleh Pak Wamenlu dan semua tim dari Kementerian Luar Negeri.

Ibu-Bapak yang saya hormati,

Pada kesempatan rapat kali ini perkenan kami, perkenankanlah kami mewakili Presiden Republik Indonesia menyampaikan penjelasan pemerintah atas 5 Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional di Bidang Pertahanan.

Kelima RUU tersebut, yaitu pertama RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.

Kedua, RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan.

Ketiga, RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Keempat, RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Dan kelima, RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan.

Pimpinan dan Anggota Komisi I yang saya hormati,

Sebelum memberikan penjelasan mengenai perjanjian tersebut satu persatu, izinkan kami untuk memberikan gambaran umum mengenai perjanjian tersebut. Perjanjian kerja sama pertahanan dengan mitra dibuat untuk mendapatkan manfaat strategis, antara lain peningkatan kapasitas pertahanan, transfer teknologi, riset bersama, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertahanan.

Kerja sama-kerja sama semacam ini semakin penting untuk dilakukan guna meningkatkan ketahanan nasional Indonesia di tengah dunia yang semakin dipenuhi ketidakpastian, serta semakin runcingnya rivalitas geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar.

Kerja sama tersebut juga dibuat dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar negara, antara lain politik luar negeri bebas aktif, kerja sama tersebut bukan merupakan pakta pertahanan maupun aliansi militer, melainkan penguatan kerja sama dan *confidence building measures* dalam

rangka turut menjaga integritas wilayah NKRI dan memperkuat persahabatan dengan lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata negara-negara tersebut.

Kelima perjanjian tersebut juga disusun berdasarkan prinsip, kesetaraan, keuntungan bersama, dan penghormatan penuh atas kedaulatan dan integritas wilayah..., integritas wilayah. 5 perjanjian akan melengkapi perjanjian kerja sama pertahanan yang telah dibuat dengan 21 negara sahabat.

Pimpinan, Anggota Komisi I yang saya hormati,

Izinkan saya menjelaskan perjanjian dengan 5 negara ini satu persatu. Pertama, perjanjian antara Indonesia dan India. Perjanjian ini telah tangani secara sirkuler pada 25 Mei 2018, di New Delhi dan 27 Mei 2018, di Jakarta oleh Menteri Pertahanan Indonesia dan India.

Pengesahan perjanjian diharapkan dapat membuka pintu pengembangan teknologi dan industri pertahanan, serta peningkatan kualitas SDM pertahanan. India merupakan negara yang telah mampu mengembangkan kapabilitas industri pertahanan secara signifikan. Dengan kemampuannya, India mampu mengekspor produk pertahanan dengan jumlah ekspor meningkat 21 kali lipat dalam satu dekade terakhir. Kerja sama meliputi pendidikan, pelatihan, dan latihan militer bersama, pengembangan bidang sains dan teknologi pertahanan, pertukaran personel, serta dukungan logistik.

Kedua, perjanjian antara Indonesia dengan Prancis telah ditandatangani pada 28 Juni 2021 di Paris, oleh Menteri Pertahanan Indonesia dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis. Prancis merupakan salah satu negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Prancis memiliki industri pertahanan yang maju, merupakan pengeksport produk pertahanan terbesar kedua setelah Amerika Serikat dan merupakan mitra potensial dalam memajukan industri pertahanan dalam negeri.

Perjanjian ini mencakup kerja sama intelijen di bidang pertahanan, Pendidikan dan pelatihan, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan, pemeliharaan perdamaian, bantuan kemanusiaan, produksi penelitian dan pengembangan bersama peralatan pertahanan.

Ketiga, perjanjian antara Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab telah ditandatangani 24 Februari 2020 di Abu Dhabi, oleh Menteri Pertahanan Indonesia dan Persatuan Emirat Arab. Kerja sama pertahanan ini memiliki arti penting, guna mengembangkan produksi bersama industri pertahanan kedua negara, antara lain dalam pembuatan amunisi dan produksi komponen senapan. Kerja sama dalam perjanjian meliputi pertukaran informasi, industri pertahanan, dan peningkatan kapasitas.

Keempat, antara Indonesia dan Kamboja telah ditandatangani di Pampanga Filipina pada 23 Oktober 2017 di sela-sela pertemuan ASEAN *Defense Minister Meeting* (ADMM) oleh Menteri Pertahanan Indonesia dan Kamboja. Perjanjian dengan Kamboja difokuskan pada dialog, pertukaran kunjungan, pertukaran informasi ilmu dan teknologi pertahanan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Perjanjian ini juga diharapkan dapat membuka peluang peningkatan kerja sama ekspor produksi senjata buatan Indonesia, di mana Kamboja telah menjadi salah satu negara tujuan.

Kelima, perjanjian antara Indonesia dan Brasil telah ditandatangani secara sirkular pada 30 Maret 2017, di Jakarta dan 5 April 2017, di Rio De Janeiro, oleh Menteri Pertahanan Indonesia dan Brasil. Kerja sama mencakup pertukaran kunjungan, pertemuan antar institusi, pengembangan sumber daya manusia, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman.

Pengesahan perjanjian juga akan membuka peluang kerja sama lain terutama dukungan logistik, transfer teknologi, serta *joint research, joint production, maupun joint marketing*. Menurut data *Council of Foreign Relation*, Brasil memiliki kekuatan militer terbesar kedua di belahan bumi bagian barat setelah Amerika Serikat. Dan, Brasil memiliki jaringan industri pertahanan yang mapan dengan 220 perusahaan pertahanan yang melayani 85 negara mitra.

Pimpinan dan Anggota Komisi I, yang saya hormati,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, syarat berlakunya perjanjian internasional di bidang pertahanan perlu disahkan dalam bentuk undang-undang. Untuk itu, kami sampaikan 5 Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik tersebut, guna mendapatkan persetujuan bersama untuk pengesahannya dan undang-undang tersebut akan menjadi dasar hukum dalam setiap pelaksanaan kerja sama dalam bidang pertahanan antara Indonesia dengan masing-masing negara mitra.

Pimpinan dan Anggota Komisi I, yang terhormat,

Demikian penjelasan Pemerintah yang dapat kami sampaikan dan secara simbolis akan kami serahkan kepada Pimpinan Komisi I. Kami siap mendengarkan pandangan fraksi dan besar harapan Pemerintah agar rancangan undang-undang tersebut dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan DPR RI, sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T./F-P. DEMOKRAT):

Baik, terima kasih, Bu Menlu, telah memberikan penjelasan dan juga merancang, menyerahkan draf dari kelima RUU tersebut. Selanjutnya, kami persilahkan pada masing-masing fraksi untuk memberikan pandangan terhadap 5 RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan yang tadi sudah dijelaskan.

Kesempatan pertama atau tiga pertama, kami berikan kepada Fraksi PDI Perjuangan, kemudian siap-siap Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Gerindra.

Kami persilakan.

Sebentar dari Fraksi PDI Perjuangan kami persilakan Bapak Muhammad Idham Samawi, untuk menyampaikan.

F-PDIP (Drs. H. MOHAMMAD IDHAM SAMAWI):

Bismillahirrahmanirrahim.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddaya,
Rahayu.*

**Yang kami hormati, Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,
Yang saya hormati, Ibu Menteri Luar Negeri beserta seluruh jajaran,
Yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Pertahanan beserta seluruh jajaran,
Yang saya hormati, Saudara yang mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta seluruh jajaran,
Bapak-Ibu Saudara sekalian yang berbahagia,**

Merdeka!

Sebagai insan Indonesia yang berpancasila khususnya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, marilah setiap mengawali kegiatan kita senantiasa kita awali dengan memanjatkan puji dan rasa syukur kita ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua meyakini hanya karena rahmat serta hidayah-Nya *alhamdulillah* pada pagi, siang hari ini kita dapat mengikuti kegiatan Rapat Kerja antara Komisi I DPR RI dengan Pemerintah dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apa.

Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik India, Republik Federasi Brasil, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan serta Rancangan Undang-Undang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Kementerian

Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di bidang Pertahanan.

Bapak-Ibu Saudara sekalian,

Saya mohon maaf tidak akan saya bacakan seluruhnya, tapi intinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan apresiasi kepada Pemerintah ketika mencoba untuk mengimplementasikan cita-cita kemerdekaan kita, cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pertama, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia serta tumpah darah Indonesia dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial.

Nah, Fraksi PDI Perjuangan menyarankan kepada Pemerintah untuk itu dinarasikan. Tujuannya supaya semua calon-calon pemimpin bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita paham, bahwa empat perkara cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia kita itu tertuang di alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar dan merupakan tugas pokok fungsinya Presiden Republik Indonesia, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi, keadilan sosial. Jadi, kerja sama yang sedang dilakukan ini adalah bagian melaksanakan cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Dengan demikian, Bapak-Ibu Saudara sekalian, Pimpinan Sidang, Bapak-Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini, kami dari Fraksi PDI Perjuangan menyetujui pembahasan 5 Rancangan Undang-Undang berikut bersama Pemerintah ke tahap berikutnya. Mencakup, yang pertama, RUU tentang Pengesahan Persetujuan antar Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, yang kedua RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan, yang ketiga, RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama Bidang Pertahanan, yang keempat, RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, dan yang kelima RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Demikian, pandangan umum yang kami sampaikan dan nanti dokumen ini akan kami serahkan secara keseluruhan, karena kalau saya baca semuanya hampir satu jam waktunya.

Atas perhatian dan kerja sama semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Merdeka! Merdeka! Merdeka!

KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T./F-P. DEMOKRAT):

Baik, terima kasih.

F-PDIP (Drs. H. MOHAMMAD IDHAM SAMAWI):

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Mohon izin, kami serahkan.

KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T./F-P. DEMOKRAT):

Baik, terima kasih, Pak Idham.

Selanjutnya, dari Fraksi Partai Golkar, Ibu Christina Aryani, kami persilakan.

F-P. GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E, S.H., M.H.):

Ya, terima kasih, Pimpinan.

F-PDIP (Drs. H. MOHAMMAD IDHAM SAMAWI):

Masih satu lagi.

KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T./F-P. DEMOKRAT):

Ada yang ketinggalan? *Oh, ya.*

F-P. GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E, S.H., M.H.):

Pandangan Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terhadap rancangan undang-undang yang memuat kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik India, Pemerintah Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Pemerintah Kerajaan Kamboja, dan Pemerintah Republik Prancis di Bidang Pertahanan.

Dibacakan oleh Christina Aryani, S.E., S.H., M.H., Nomor Anggota A-286, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2.

**Yang terhormat Pimpinan Komisi I DPR RI,
Yang terhormat para Anggota Komisi I DPR RI,**

**Yang terhormat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia,
Yang terhormat Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia,
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili,**

Hadirin yang kami hormati,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pada kesempatan yang mulia ini dengan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, kita semua berkumpul dalam forum strategis untuk mendengarkan dan memberikan pandangan terhadap 5 rancangan undang-undang yang memuat tindak lanjut kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Federatif Brasil, Pemerintah Republik India, Pemerintah Republik Prancis, Persatuan Emirat Arab, dan Pemerintah Kerajaan Kamboja.

Pembahasan dalam forum ini dinilai sangat strategis karena berkaitan langsung dengan kedaulatan negara sampai dengan keterlibatan kita dalam interaksi global guna menciptakan ketertiban dunia. Atas dasar tersebut, rumusan regulasi yang harus diselesaikan perlu ditopang dengan pandangan jernih yang bisa berkontribusi dalam upaya menumbuhkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Pimpinan Komisi I, Anggota Komisi I, Saudara Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Pertahanan, dan para hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun '45, negara mempunyai kewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan yang sungguh luhur ini perlu ditopang dengan upaya-upaya kerja sama dengan negara-negara lain dengan membangun interaksi global, dan merekatkan tali persahabatan antar negara, serta mengaiteratkan kebatinan Pemerintah Republik Indonesia dengan negara-negara lain di dunia.

Sebagaimana kita ketahui bersama setiap negara saat ini sudah kian terhubung. Keterbukaan ini tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga memicu kekhawatiran dan ketidakpastian yang diakibatkan oleh persaingan antar negara.

Beragam destruksi global akibat perubahan lingkungan, perkembangan teknologi digital, ekonomi, hingga politik dan peperangan membutuhkan kolaborasi bilateral yang berpijak pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang lebih luas dengan berpegang pada asas dan prinsip kedaulatan, kesetaraan, konsensualisme, kebermanfaatn, serta saling menguntungkan.

Dalam forum ini, sebagaimana pemberitahuan yang kami terima ada 5 rancangan undang-undang mengenai kerja sama di bidang pertahanan yang

apabila tidak segera ditindaklanjuti atau diratifikasi menjadi undang-undang bisa mengalami kekosongan hukum.

Kami juga melihat hubungan diplomatik dengan 5 negara ini telah memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Republik Indonesia, baik dari segi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kecakapan teknologi, pembaruan-pembaruan persenjataan, serta *sharing* pengetahuan, pendidikan, dan pelatihan di bidang pertahanan.

Melalui potensi kerja sama dan keuntungan yang bisa didapatkan oleh kedua negara, Fraksi Partai Golkar DPR RI berpendapat sebagai berikut:

1. Pertama, pengesahan perjanjian ini dapat meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral dan posisi Indonesia di kancah global.
2. Kedua, pengesahan perjanjian ini dapat mengakselerasi pengetahuan, pengalaman, kapasitas, dan kompetensi sumber daya manusia di bidang pertahanan, serta adaptasi dengan perkembangan-perkembangan teknologi baru di bidang pertahanan.
3. Ketiga, pengesahan perjanjian ini dapat mengembangkan industri bidang pertahanan, dan memperkuat kedaulatan pertahanan Indonesia, serta membuat persenjataan Indonesia menjadi lebih modern.
4. Keempat, pengesahan perjanjian ini dapat mengimplementasikan komitmen dalam pengaturan keamanan, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan terhadap informasi rahasia antar negara berdasarkan kesepakatan perjanjian sesuai ketentuan masing-masing negara.
5. Kelima, pengesahan perjanjian ini dapat memberikan kepastian hukum bagi kementerian/lembaga terkait, antaranya Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjaga hubungan diplomatik, kedaulatan negara, serta penguatan bidang pertahanan melalui pemanfaatan kemajuan teknologi.

Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan implikasi positif yang bisa didapatkan Indonesia dari kerja sama sebagaimana dimaksud, maka dengan ini Fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan menyetujui rancangan undang-undang yang memuat kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah India, Pemerintah Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Pemerintah Kerajaan Kamboja, dan Pemerintah Republik Prancis di bidang pertahanan untuk dapat dibahas pada tingkat lebih lanjut.

Demikian Pandangan Fraksi Partai Golkar, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan, dan petunjuk, serta rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua dalam usaha menunaikan tugas pengabdian pada bangsa dan negara.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua, Kahar Muzakir, Sekretaris, Adies Kadir.

KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T./F-P. DEMOKRAT):

Baik, terima kasih, Ibu Christina Aryani.

Selanjutnya Fraksi Partai Gerindra, Bapak H. Subarna, kami persilakan.

F-P. GERINDRA (H. SUBARNA, S.E., M.Si.):

Pandangan Umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintahan:

1. Kerajaan Kamboja,
2. Pemerintahan Republik India,
3. Pemerintah Republik Federatif Brasil,
4. Pemerintah Republik Prancis, dan
5. Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab.

Dibacakan oleh H. Subarna, Nomor Anggota A-95, Daerah Pemilihan Jawa Barat XI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Salam Indonesia Raya.

**Yang kami hormati Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,
Saudara Menteri Luar Negeri,
Saudara Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia,
Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Hadirin yang kami hormati,**

Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan hormat dan karunia-Nya kepada kita hari ini untuk menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan agenda pendapat umum fraksi-fraksi terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintahan Republik Indonesia dan kelima negara tersebut tentang kerja sama di bidang pertahanan, dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

**Saudara Pimpinan, dan para Anggota Komisi I DPR RI, dan Menteri,
Wakil Menteri yang mewakili pemerintah yang saya hormati,**

Setelah mencermati dan menelaah apa yang disampaikan Menteri Luar Negeri, di mana dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara, kemampuan mempertahankan diri

terhadap ancaman dan gangguan dari luar negeri, dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Jadi, sangatlah penting menjaga kerja sama dengan pemerintah kelima negara tersebut di atas, untuk memelihara stabilitas regional maupun internasional. Dalam meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral, kerja sama di bidang pertahanan diharapkan akan mendorong kerja sama di sektor lain yang bermanfaat bagi pembangunan dan kebutuhan bangsa dan negara.

Pengesahan persetujuan ini akan menjadi langkah penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan kelima negara di atas, untuk menghadapi tantangan keamanan ke depan.

Saudara Pimpinan, dan para Anggota Komisi I DPR RI dan para Menteri, hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya untuk lebih jelas di atas, kami lampirkan Pandangan Umum Fraksi Gerindra terhadap kerja sama di bidang pertahanan dengan kelima negara tersebut.

Saudara Pimpinan, para Anggota Komisi yang kami hormati,

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan satu, Pemerintah Kerajaan Kamboja, dua Pemerintah Republik India, tiga Pemerintah Republik Federasi Brasil, empat Pemerintah Republik Prancis, dan kelima Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara.

*Billahi taufil wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 19 Juni 2024, Pimpinan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua, H. Ahmad Muzani, ditandatangani.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T./F-P. DEMOKRAT):

Baik, terima kasih, Pak Subarna, dari Fraksi Partai Gerindra.

Sebelum kita melanjutkan dari meja Pimpinan mengharapkan dari juru bicara fraksi-fraksi untuk dapat mempersingkat karena secara dokumen kita serahkan lengkap. Kalau masing-masing 3 menit masih ada 6 fraksi kurang lebih 18 menit. Jadi kalau masing-masing 10 menit, kira-kira kali 6 fraksi ya 600 menit mungkin lebih.

Baik, selanjutnya Fraksi Partai Nasdem, yang terhormat Bapak Hasbi Anshory, kami persilakan.

F-P. NASDEM (HASBI ANSHORY, S.E., M.M.):

Baik, terima kasih, Pimpinan, saya patuh terhadap Pimpinan.

Pandangan Fraksi Partai Nasdem DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan, yang pertama Republik India, Republik Federasi Brasil, Republik Prancis, Persatuan Emirat Arab, dan Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama dalam Pertahanan tahun pembahasan 2024.

Disampaikan oleh Hasbi Anshori, Nomor Anggota A-355, Daerah Pemilihan Provinsi Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Dan salam kebajikan.

**Yang terhormat, Saudara Pimpinan sidang,
Yang terhormat, Saudara Anggota Dewan,
Yang terhormat, Menteri Luar Negeri,
Yang terhormat, Bapak Wakil Menteri Pertahanan,
Yang terhormat, Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili.**

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dan Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili, serta hadirin yang terhormat. Demikianlah pandangan Fraksi Partai Nasdem terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan.

Nanti dulu saya setuju.

KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T./F-P. DEMOKRAT):

Sebelum demikian itu, ada kami menyetujuinya jangan lupa itu.

Silakan.

F-P. NASDEM (HASBI ANSHORY, S.E., M.M.):

Jadi yang lain jangan protes dulu, saya baca baru protes, *nah*, saya baca baru protes.

Demikianlah Pandangan Fraksi Partai Nasdem terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India, Republik Federasi Brasil, Republik Prancis, Persatuan Emirat Arab, dan Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, maka Fraksi Partai Nasdem DPR RI menyetujui agar RUU ini dapat dibahas pada tahap pengambilan keputusan selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atas segala perhatian yang diberikan, maka Fraksi Partai Nasdem DPR RI mengucapkan banyak terima kasih, mohon maaf atas kehilafan dan kesalahan, semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan keridhoan-Nya, *aamiin ya rabbal alamin*.

Salam sejahtera buat kita semua,
Shalom,
Om santi santi santi om,
Namo buddhaya, dan
Salam kebajikan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua, Roberth Rouw, dan Sekretaris, Saan Mustopa.

Salam restorasi.

KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T./F-P. DEMOKRAT):

Terima kasih, Pak Hasbi dari Fraksi Partai Nasdem.

Selamat datang, Ketua.

Selanjutnya kita ke Fraksi PKB, Bapak Drs. H. Taufiq R. Abdullah, kami persilakan.

F-PKB (Drs. H. TAUFIQ R. ABDULLAH):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang terhormat Pimpinan Komisi I,
Anggota Komisi I,
Menteri Pertahanan,**

**Ibu Menteri Luar Negeri,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,**

Izinkan saya menyampaikan Pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan, terhadap 5 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia.

Yang pertama, tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.

Yang kedua, dengan Pemerintah Republik Perancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Yang ketiga, dengan pemerintah Republik Federasi Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan.

Yang keempat, dengan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Lalu yang kelima, Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Kami sampaikan bahwa Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa secara prinsip sangat menyetujui karena perjanjian-perjanjian kerja sama itu di samping sangat penting, juga sangat strategis dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan kelima negara itu. Apalagi misalnya perjanjian kerja sama dengan Brasil sudah berjalan selama 6 tahun, dengan Kamboja 6 tahun, India 5 tahun, dengan Prancis 4 tahun, dan Uni Emirat Arab sudah 4 tahun.

Oleh karena itu, seiring yang persetujuan kami, kami juga menyetujui agar RUU ini dibahas sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Demikian pandangan kami, kurang lebihnya mohon maaf.

*Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq,
Wasssalamuallaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Ini RUU PKS, Perjanjian Kerja Sama.

KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T./F-P. DEMOKRAT):

Baik, terima kasih, Pak Taufiq Abdullah, dari Fraksi PKB.

Selanjutnya dari Fraksi Partai Demokrat, Bapak Rizki Aulia Rahman Natakusumah, kami persilakan.

F-P. DEMOKRAT (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Demokrat bersama rakyat.

Yang saya hormati Pimpinan, Pak Teuku Riefky, Bu Ketua, Bu Meutya, Anggota Komisi I yang saya hormati, Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia atau yang mewakili, Pak Wamen, Pak Wamenlu juga hadir, Yang mewakili Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta hadirin yang kami hormati,

Izinkan saya menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik India, Pemerintah Republik Federatif Brasil, Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab, Pemerintah Kerajaan Kamboja, dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Pertama, secara umum ratifikasi kerja sama di bidang pertahanan ini merupakan bagian dari pengamalan amanat undang-undang Negara Republik Indonesia, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Poin kedua yang menurut saya lebih penting, ratifikasi kerja sama ini merupakan salah satu bentuk peran aktif Indonesia dalam rangka memperkuat persepsi keamanan global bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak menginginkan terjadinya eskalasi konflik. Mengingat semua permasalahan antar negara dapat diselesaikan melalui pendekatan damai.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Fraksi Partai Demokrat memandang Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan beberapa negara mitra di bidang pertahanan perlu dibahas dan diperiksa bersama secara seksama. Oleh karena itu, Fraksi Partai Demokrat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara yang tadi sudah disebutkan. Untuk dapat dibahas pada pembahasan tingkat I.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Demokrat disampaikan, semoga DPR RI bisa terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan harapan rakyat.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Ditandatangani Pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPR RI

KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T./F-P. DEMOKRAT):

Terima kasih, Pak Rizki Natakusumah, yang akhir minggu ini akan menikah. Jadi, tadi memang kita minta persingkat biar energinya bisa difokuskan untuk acara pernikahan.

Pak Nico, juga rencana, *nggak* ada rencana lagi kan? Oke, selanjutnya Fraksi PKS, kami persilakan.

F-PKS (Dr. H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang kami hormati, Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,
Yang kami hormati, Ibu Menlu dan Wakil Menlu,
Yang kami hormati, Menteri Pertahanan atau yang mewakili,
Yang kami hormati, Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili,**

Berikut, kami akan sampaikan Pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap 5 Rancangan Undang-Undang tentang Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia dengan India, dengan Brasil, dengan Uni Emirat Arab, dengan Kamboja tentang Pertahanan.

Dibacakan langsung oleh Ketua Fraksi karena anggotanya *enggak* ada. Setelah mencermati apa yang dipaparkan oleh pemerintah, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucap *bismillahirrahmanirrahim* dan memohon ridho Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, menyetujui 5 RUU ini untuk dibahas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan catatan, kerja sama harus dibangun atas dasar prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Yang kedua, kerja sama harus dibangun dengan tujuan untuk saling menguntungkan kedua belah pihak antara Negara Republik Indonesia dengan negara terkait. Yang ketiga, kerja sama dibangun untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat, kerja sama dibangun untuk mewujudkan perdamaian dunia.

Demikian Pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait 5 RUU tersebut di atas.

Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua, Dr. Jazuli Juwani, ditandatangani, dan Sekretaris, Hj. Ledia Hanifa, ditandatangani.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T./F-P. DEMOKRAT):

Baik, terima kasih Pak Jazuli.

Selanjutnya ke Fraksi PAN, Bapak Bakri, Bapak H. Bakri.

F-PAN (H. A. BAKRI, S.E.):

Baik.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Uni Emirat Arab Kerja Sama di Bidang Pertahanan, begitu juga dengan kementerian..., Negara Kamboja, terus India, dan Brasil, Prancis, pas sudah.

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,
Saudara Menteri Luar Negeri yang kami hormati,
Saudara Menteri Pertahanan yang kami hormati atau yang mewakili,
Saudara Menteri Hukum atau yang mewakili,**

Pertama-tama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala, alhamdulillah*, Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua dan dapat melaksanakan tugas konstitusional dalam rangka memberikan pandangan fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, baik Pemerintahan Kamboja, Emirat Arab, terus India, Prancis, serta Brasil.

Saudara Pimpinan dan Saudara Menteri yang saya hormati,

Untuk mempersingkat waktu, partai..., Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Fraksi PAN DPR RI menyatakan siap membahas Rancangan Undang-Undang terhadap tentang Pemerintahan Kerajaan Kamboja, Emirat Arab, terus Prancis, India, dan.

Demikian Pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional, undang-undang tersebut di atas.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 19 Juni 2024, Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A., Ketua, ditandatanganinya, Eko Hendro Purnomo, S.Sos., Sekretaris, ditandatanganinya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T./F-P. DEMOKRAT):

Baik, terima kasih, Pak H. Bakri dari Fraksi PAN.

Selanjutnya Fraksi PPP, menitipkan dokumen ke kami, ke meja Pimpinan. Izin membacakan, izin membacakan paragraf terakhir saja. Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi PPP DPR RI menyatakan setuju terhadap RUU Pengesahan Persetujuan antar Pemerintah Republik Indonesia 5 RUU tersebut, yaitu dengan Pemerintah Prancis, India, Brasil, Emirat Arab, dan Kamboja. Untuk meminta agar Rapat Kerja Komisi I melanjutkan kepada pembahasan tingkat II, guna disetujui bersama oleh DPR RI dan pemerintah.

Demikian, Jakarta, 19 Juni, Pimpinan Fraksi PPP DPR RI, Sekretaris, Achmad Baidowi.

Baik, Bapak-Ibu yang kami hormati,

Kita telah mendengarkan pandangan 9 fraksi terhadap RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan. Selanjutnya, kita akan masuk ke pengesahan, ya pengesahan dan untuk mengetok satu persatu mohon dapat..., untuk mendapat persetujuan dari Pimpinan, Anggota Komisi I, dan pemerintah untuk..., pengesahan untuk pembahasan ya kepada panja nantinya.

Oke, yang pertama mohon persetujuan..., atau sekaligus saja ya lima-limanya ya. Ya, untuk mohon persetujuan dari Komisi I dan Pemerintah terkait pembahasan 5 RUU, yaitu RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.

Kemudian yang kedua adalah RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Yang ketiga, RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Yang kelima, RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Dan terakhir yang kelima, RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Pertahanan.

Apakah dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Pemerintah?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan DIM RUU dan DIM penjelasan terhadap 5 RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan.

F-PKS (Dr. H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A.):

Izin, Ibu Ketua, langsung pembahasan atau....

KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T./F-P. DEMOKRAT):

Tidak, tidak.

F-PKS (Dr. H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A.):

Bentuk panja dulu?

KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T./F-P. DEMOKRAT):

Ya, sebentar ya, kami ingin menawarkan kepada rapat kerja hari ini, apakah pembahasan DIM RUU dan DIM penjelasan terhadap kelima RUU Pengesahan Persetujuan tentang Kerja Sama terkait Pertahanan tersebut, dapat kita yang pertama dapat kita setujui, sekali lagi dapat disetujui ya.

(RAPAT: SETUJU)

Dan, kemudian apakah kita akan membahas bagaimana kalau di hari Senin pukul 10.00 pagi ya, 10 ya tanggal..., apa tanggal 24 Juni, hari Senin, jam 10.00 pagi.

(RAPAT: SETUJU)

Setuju ya? oke.

Selanjutnya kita telah menyelesaikan rangkaian rapat dan juga mendengarkan juga tanggapan dari 9 fraksi, termasuk kesepakatan untuk DIM RUU dan DIM penjelasan..., penjelasan yang ditugaskan kepada panja untuk selanjutnya. Dan, selanjutnya Komisi I DPR dan pemerintah masing-masing akan membentuk tim panja dan memberikan nama-nama Anggota Panja kepada kami. Dan, dapat kami sampaikan bahwa panja dipimpin oleh salah seorang pimpinan komisi dan menteri dapat diwakili pejabat eselon I yang membidangi materi RUU yang sedang dibahas. Untuk rapat selanjutnya kita sudah masuk dalam agenda panja.

Baik, untuk, untuk itu raker pada hari ini dapat kita tutup dan raker selanjutnya dengan agenda adalah....

F-PDIP (Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):

Mohon izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T./F-P. DEMOKRAT):

Iya.

F-PDIP (Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):

Hari Senin itu kita mulai diskusi panja atau hari Senin kita akan berbicara soal kesimpulannya.

KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T./F-P. DEMOKRAT):

Diskusi panja.

F-PDIP (Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):

Oh, diskusi panja, kira-kira berapa hari? Bagaimana?

KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T./F-P. DEMOKRAT):

Kita ya jadi diskusi panja akan ada perwakilan dari pemerintah dan masing-masing fraksi, dan kalau kita lihat juga pasal-pasalnya juga tidak terlalu banyak, kita coba untuk kita selesaikan dalam 1 hari tapi kalau tidak memungkinkan kita bisa beberapa hari ke depan selanjutnya.

F-PDIP (Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):

Baik, saya kira kalau bisa hari Senin pagi, kita kemudian siangya kita undang pemerintah tentang kesimpulannya, sehingga hari Senin kita sudah bisa selesai. Karena apa? Kami mengikuti berbicara dengan para pakar selesai ya dan diwakili oleh fraksi-fraksi. Yang kedua, dengan pemerintah juga sudah selesai begitu. Saya mohon ini kan bukan pakta pertahanan,

hanya kerja sama saja begitu. Jangan sampai ada kesan kita menunda-nunda ya, kalau mudah mengapa dipersulit, *nah* begitu ya.

Saya pikir menurut hemat saya, Senin pagi kita diskusi sebentar dan saya monitor selama berbicara dengan para dan pemerintah sejak awal, hampir tidak ada yang resisten begitu ya. Saya pikir saran saya kemudian siangnya sudah ya raker kalau mungkin. Cuma banyak juga pada hari Senin itu yang kunker begitu, ke..., kan kami ada yang di Badan Anggaran, di Baleg, kemudian di Mahkamah..., Partai begitu ya, di MPR, di MKD begitu. Jadi, ya mohon maaf hanya saran saja.

Terima kasih, Pak, Baik, Ketua.

KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T./F-P. DEMOKRAT):

Prinsipnya masukannya kami terima tetapi mengenai waktu, yang paling penting adalah panja selesai bekerja, walaupun nanti waktu Bu Menteri bisa dicocokkan kita akan menyesuaikan waktu Bu Menlu ya, mungkin secepatnya, karena beliau juga ada beberapa agenda rencananya kunjungan ke luar negeri katanya minggu depan.

Baik, tadi saya ulangi bahwa raker, raker pada hari ini kita tutup tetapi agenda raker selanjutnya setelah panja selesai adalah laporan panja, pendapat akhir mini fraksi, pendapat akhir pemerintah, penandatanganan naskah RUU, dan penjelasan, serta penutup. Jadi, itu agenda raker selanjutnya yang waktunya nanti kita cocokkan segera, kita percepat tetapi kita mengharapkan kehadiran Bu Menlu pada agenda tersebut.

Baik, Bapak-Ibu sekalian, sebelum kami tutup kami mohon tanggapan dari Ibu Menlu dan mungkin dari Kementerian, dari Menhan, kemudian juga dari Kementerian Kumham untuk memberikan *closing remarks*.

Silakan.

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA (RETNO LESTARI PRIANSARI MARSUDI, S.H., LL.M.):

Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Komisi I yang terhormat,

Pertama-tama, tentunya terima kasih kepada Pimpinan rapat dan juga semua Anggota atas inisiatif pembentukan panja. Atas nama pemerintah kami menyampaikan persetujuan pembentukan panja untuk menyelesaikan pembahasan 5 DIM RUU dan Penjelasan RUU Pengesahan Perjanjian Internasional di Bidang Pertahanan dengan India, Prancis, Persatuan Emirat Arab, Kamboja, dan Brasil. Dan, kami juga sampaikan apresiasi atas persetujuan fraksi untuk melanjutkan pembahasan naskah RUU ini.

Dan sebagai penutup Ketua, Pimpinan, dan Anggota yang saya hormati, mewakili Presiden Republik Indonesia, izinkan kami sekali lagi

menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama Komisi I memulai pembahasan RUU tingkat I dan memohon dukungan agar pembahasan ini dapat berjalan lancar hingga tahapan pengambilan keputusan dalam pembahasan tingkat II dan Rapat Paripurna DPR.

Demikian yang dapat kami sampaikan, Pimpinan, sekali lagi terima.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T./F-P. DEMOKRAT):

Baik, terima kasih kepada Ibu Menlu, Bapak Wamenlu, Bapak Wamenhan, Bapak Sekjen Kemhan, Bapak Dirjen HPI Kemlu, Bapak Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemkumham, dan seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi I yang telah mengikuti raker pada hari ini.

Rapat kami tutup, sekali lagi terima kasih.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.34 WIB)

**Jakarta, 19 Juni 2024
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**Sartomo, S.S., M.Si.
NIP. 196808111996031001**